



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DONY AHMAD MUNIR**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **33901**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 945.294.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/210 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 4070 m2/280 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 229.650.000
4. Tanah Seluas 872 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 23.544.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/108 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.050.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 36.050.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 260.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 147.000.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 979.037.475**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.331.331.475
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.331.331.475

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.